

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004).
- Besar, Abdulkadir, *Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi ideologik, niscayaan moted berfikir*, (Jakarta: Pustaka Azhary, 2005).
- B.Hestu, Cipto Handoyono, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Yogyakarta: Kelompok Penerbut Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).
- Haris, Syamsudinm , *Menggugat Pemilihan Umum Order Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011).
- Isnaeni Ramadhan, Moh, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Mahfud, Moh, *Dasar&struktur ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Saragih Bintang, Moh, Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Soegono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo 1992).

Surono, Agus, *Hubungan Presiden dan Wakil*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008).

Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Media Group, 2010).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Jurnal

Abu Tamrin, *Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung di Era Reformasi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Dhanang Alim Maksu, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden*, Lex Crimen, Volume 1, Nomor 1, Jan-Mar 2015.

Ida Budhiati, *Qua Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu*, Maslah-Masalah Hukum, Jilid 42, Nomor 2, April 2013.

Lutfil Ansori, *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.

M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstutsi Indonesia*, Jurnal Yustisia, Volume 2, No. 3, September-Desember 2015.

M Yasin al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 22, Nomor 2, April 2015.

Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor.2, Desember 2014.

Novita Mandasari Hutagaol, *Analisis dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi 1950 Dan UUD 1945 Amandemen Substansi Kompirasi dan Perubahan yang Penting*, Jurnal Unrika, Volume 5, Nomor 1, Januari 2014.

Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 3, Januari 2012.

Sri Warjiati, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume. 2, Nomor 2, Oktober 2012.

Sunarto, *Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016.

Tri Karyanti, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Majalah Ilmiah Informatika, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2012.

4. Website

<https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Pahlawan&opsi=mulai-2>, Departemen Sosial RI Online, Januari 2010. Diakses 21 Mei 2017.

Anwar, Rosihan, <https://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/22/opini/201381.htm>; (22 Maret 2003), diakses tanggal 21 Mei 2018

<https://tokoh.id/ensiklopedi/t/try-sutrisno/index.shtml>; diakses tanggal 20 Mei 2018.

http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=4&presiden=habibie; diakses tanggal 22 Mei 2018.

<https://perpustakaan.id/?s=filipina>; diakses 21 Mei 2018.

<https://perpustakaan.id/?s=Amerika+Serikat>; diakses pada 21 Mei 2018.

<https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>; diakses pada 28 April 2018.

<https://perpustakaan.id/?s=Afrika+Selatan>; diakses pada 21 Mei 2018.

<https://gurupkn.com/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial>; diakses tanggal 1 Maret 2017.

